

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai diatur melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 42 Tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Binjai.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025 - 2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai bertanggungjawab terhadap urusan komunikasi dan informatika yang difokuskan untuk mewujudkan visi pemerintah kota Binjai Tahun 2025 - 2029 yaitu mewujudkan “**Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**”, pada misi ke empat yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif”, dengan tujuan mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan

pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika.

Saat ini perkembangan dunia terkait dengan Komunikasi dan Informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publik pun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Pelayanan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-government) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (*Government to Citizen, Government to Employee, Government to Government*).

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2025 - 2029 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA, RKPD yang sekaligus dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan TIK selama kurun waktu 2025 - 2029.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan

- Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang

Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Binjai No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);

19. Peraturan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2025- 2045;
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus sebagai acuan kesesuaian dalam menetapkan program/kegiatan, sasaran strategis sekaligus dapat menjadi pedoman bagi arah kebijakan keuangan selama 5 tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota binjai Tahun 2025 - 2029.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021 –2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
- 2.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
- 2.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.
- 2.6. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam
mencapai tujuan dan sasaran renstra pada
Tahun 2025-2029

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI KOTA BINJAI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai diatur melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 42 Tahun 2016.

- Tugas Pokok :

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian dan Tugas Pembantuan.

- Fungsi :

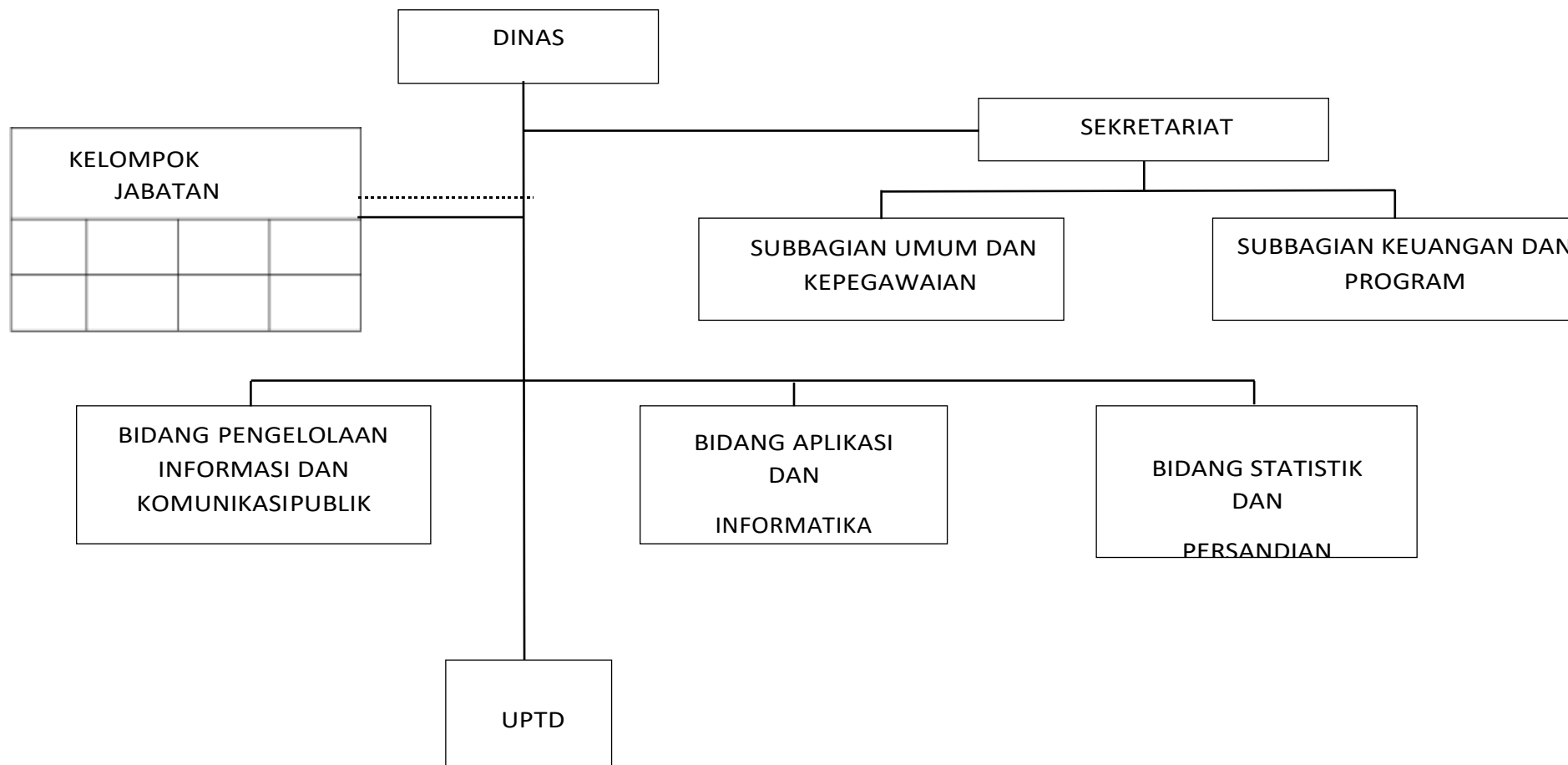
- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program;
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika
5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai didukung oleh 15 orang PNS.

- **Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan di bidang komunikasi, informatika, serta bidang statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki SDM sebanyak 15 orang PNS, 11 PTT dan 6 Tenaga Pendamping terdiri dari:

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Binjai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	Uraian	P	L	JUMLAH PEGAWAI
1	Pegawai Negeri Sipil	10	8	18
2	Pegawai Tidak Tetap	31	25	56
Jumlah				75

Sumber: Diskominfo Kota Binjai 2024

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Binjai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
				1		11	6		18

Sumber: Diskominfo Kota Binjai 2024

Tabel 2.3

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024

Gol/Ruang	Jumlah
IV/a	2
IV/b	2
IV/c	-
IV/d	-
IV/e	-
Total	4
III/a	0
III/b	2
III/c	3
III/d	8
Total	13
II/a	-
II/b	-
II/c	1
II/d	-
Total	1
I/a	-
I/b	-
I/c	-
I/d	-
Total	0
Grand Total	18

Sumber: Diskominfo Kota Binjai 2024

Selain SDM, sumber daya lain yang dapat memberi nilai tambah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Diskominfo Kota Binjai
Tahun 2024

NO	JENIS PERANGKAT	KONDISI		JUMLAH	SATUAN
		BAIK	RUSAK		
A	Alat Angkutan Darat Bermotor				
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	V		2	Unit
2	Sepeda Motor	V		8	Unit
B	Alat Ukur				
1	Global Positioning System	V		1	Unit
2	Scanner	V		2	Unit
3	Termometer Standard	V		1	Unit
4	Air Conditioning Unit	V		3	Unit
C	ALAT KANTOR				
1	Mesin Absen (Time Recorder)		V	2	Unit
2	Lemari Besi	V		9	Unit
3	Rak Besi/Metal	V		8	Unit
4	Filling Besi/Metal	V		9	Unit
5	Band Kas	V		1	Unit
6	Lemari Kayu	V		1	Unit
7	Papan Visuil	V		2	Unit
8	Alat Penghancur Kertas	V		4	Unit
D	ALAT RUMAH TANGGA				
1	Meja Besi/Metal	V		1	Unit
2	Meja Kayu/Rotan	V		3	Unit
3	Kursi Besi/Metal	V		26	Unit
4	Meja Rapat	V		2	Unit
5	Meja Reseption	V		2	Unit
6	Kursi Rapat	V		9	Unit

7	Kursi tamu	V		2	Unit
8	Sofa	V		2	Unit
9	Karpet/Permadani	V		2	Unit
10	Jam Mekanis		V	2	Unit
11	Mesin Penghisap Debu	V		2	Unit
12	Lemari Es	V		1	Unit
13	AC Split	V		10	Unit
14	Exhaust Fan	V		7	Unit
15	Cold Room Storage	V		1	Unit
16	Alat Dapur Lainnya	V		2	Unit
17	Oven Listrik	V		1	Unit
18	Televisi	V		10	Unit
19	Sound System	V		1	Unit
20	Mic Conference	V		1	Unit
21	Camera Video	V		9	Unit
22	Camera Film	V		3	Unit
23	Tangga Aluminium	V		1	Unit
24	Dispenser	V		7	Unit
25	Coffee Maker	V		1	Unit
26	Handy Cam	V		1	Unit
27	Alat Rumah Tangga Lainnya	V		1	Unit
28	Kain Gorden	V		6	Unit
E	PERALATAN KOMPUTER				
1	Local Area Network	V		1	Unit
2	P.C Unit	V		8	Unit
3	Lap Top	V		24	Unit
4	Hard Disk	V		7	Unit
5	Keyboard	V		1	Unit
6	Printer	V		16	Unit
7	Monitor	V		3	Unit
8	Peralatan personal Komputer Lain-lain	V		2	Unit
9	Server	V		3	Unit
10	Router	V		2	Unit
11	Peralatan Jaringan Lain-lain	V		2	Unit
F	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT				
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	V		1	Unit
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	V		6	Unit
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	V		19	Unit
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	V		1	Unit

5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	V		3	Unit
6	Kursi Kerja pejabat Eselon IV	V		10	Unit
7	Kursi Kantor Sandaran Rendah	V		3	Unit
G	ALAT STUDIO				
1	Camera + Attachment	V		6	Unit
2	Proyektor + Attachment	V		2	Unit
3	Microphone Connector Box	V		2	Unit
4	UPS	V		12	Unit
5	Terminal Board	V		1	Unit
6	Video Monitor	V		1	Unit
7	Tripod Camera	V		1	Unit
8	Lensa Camera	V		1	Unit
9	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	V		1	Unit
10	Peralatan Studio Video dan Film A Lain-lain	V		1	Unit
11	Drone	V		1	Unit
H	ALAT KOMUNIKASI				
1	Telephone (PABX)	V		1	Unit
2	Handy Talky	V		10	Unit
3	Handphone	V		2	Unit
4	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	V		6	Unit
I	PERALATAN PEMANCAR				
1	Switcher/Menara Antena Lain-lain	V		1	Unit
2	Swicher/Patch Panel	V		2	Unit
J	ALAT KEDOKTERAN DAN LABORATORIUM				
1	Instrument Table	V		1	Unit
2	Refrigerator	V		1	Unit
3	TV Monitor	V		1	Unit
4	Power Suply	V		2	Unit
5	Timer	V		2	Unit
6	Exhause Fan	V		2	Unit
7	Alat Crimp Tester	V		1	Unit
8	Personal Komputer	V		13	Unit
9	Kabel Listrik	V		1	Unit
10	Software Cont Off-line Computer	V		1	Unit
K	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN				
1	Teropong	V		1	Unit
L	ALAT-ALAT BESAR				

1	Tower Crane	V		1	Unit
2	Alat Penarik Jaring	V		1	Unit

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2024

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Binjai juga Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2011 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008). Selain itu, Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Diskominfo Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	SPM Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo No.27/PER/M.KOMINFO/12/2011)						
	I. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasioanal						
	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional/daerah melalui:						
	a. Media Massa						
	- Surat Kabar	51	51	51	58	59	58
	- Radio	4	4	4	4	4	4
	- Televisi	1	1	1	1	1	1
	b. Media baru seperti website (online)	17	18	19	17	18	19
	c. Melalui media tradisional seperti: Pertunjukkan rakyat	-	-	-	-	-	-
	d. Media interpersonal seperti: sareschan, ceramah/diskusi dan lokakarya	-	-	-	-	-	-
	e. Media luar ruang seperti : bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah Daerah Kab/Kota	17	18	19	17	18	19
	Persentase informasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah	75%	80%	85%	75%	79%	86%
	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik Pemerintah Daerah						
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota						
	Persentase penyelenggaraan layanan publik, kegiatan, kelembagaan di lingkungan Pemda Kab/Kota menggunakan domain resmi instansi	55%	60%	70%	65%	75%	85%
	Pengelolaan e-government di lingkup Pemda Kab/Kota						
	Indeks PeGI Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
2	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)						

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Bidang Statistik						
	a. Buku "Binjai Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1
	b. Buku "PDRB"	1	1	1	1	1	1
	Persandian						
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	IKU Diskominfo Kota Binjai						
	Nilai Indeks SPBE	N/A	2,75	3	1,82	2,99	3,12
	Persentase aplikasi pemerintahan yang digunakan OPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	55%	65%	75%	60%	70%	80%
	Prosentase OPD yang terkoneksi dengan Kominfo	50%	60%	70%	62%	65%	73%
	Prosentase tindak lanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan	75%	80%	85%	80%	90%	93%

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Binjai

Jenis Belanja	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio capaian pada tahun ke		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Belanja Tidak Langsung	Rp2.023.103.885	Rp2.047.897.529	Rp2.358.277.568	Rp1.944.342.526	Rp1.927.553.051	Rp2.257.542.046	96,11%	94,12%	95,73%
Belanja Langsung	5.181.960.212	Rp5.344.303.313	Rp7.117.592.020	Rp4.026.041.060	Rp4.278.836.427	Rp6.406.680.166	77,69%	80,06%	90,01%
	Rp7.205.064.097	Rp7.392.200.842	Rp9.475.869.588	Rp5.970.383.586	Rp6.206.389.478	Rp8.664.222.212	82,86%	83,96%	91,43%

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak atau penerima manfaat (stakeholders) yang menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan publik oleh suatu instansi/organisasi.

(stakeholders) dalam urusan komunikasi, informatika, dan pelayanan publik berbasis digital.

Kelompok sasaran ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Masyarakat Umum

- Warga negara yang berhak memperoleh informasi publik.
- Pengguna layanan internet, jaringan Wi-Fi publik, dan aplikasi layanan pemerintahan.
- Kelompok masyarakat yang memerlukan peningkatan literasi digital.
- Komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan masyarakat desa yang memanfaatkan TIK untuk ekonomi digital.

2. Aparatur Pemerintah Daerah

- OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membutuhkan sistem informasi terintegrasi.
- ASN yang memanfaatkan aplikasi e-government dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
- Pejabat pengelola data dan informasi.

3. Media dan Insan Pers

- Jurnalis, media cetak, online, maupun elektronik sebagai mitra penyebaran informasi publik.
- Lembaga penyiaran dan komunitas media lokal

4. Dunia Usaha dan Mitra Swasta

- Penyedia jasa telekomunikasi dan infrastruktur TIK.
- Startup digital dan pengembang aplikasi layanan publik.
- Investor dan mitra kerja sama di bidang teknologi informasi

5. Komunitas Pendidikan dan Akademisi

- Sekolah, kampus, dan lembaga penelitian yang membutuhkan akses data, riset TIK, dan literasi digital.
- Mahasiswa/pelajar sebagai pengguna layanan informasi digital

6. Kelompok Rentan & Inklusif

- Kelompok disabilitas yang membutuhkan akses informasi publik ramah inklusi.
- Lansia yang membutuhkan layanan digital sederhana dan mudah dipahami.

2.5. PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

Permasalahan pelayanan adalah segala bentuk hambatan, kesenjangan, atau kendala yang terjadi dalam proses penyelenggaraan layanan publik sehingga menyebabkan pelayanan tidak berjalan efektif, efisien, adil, transparan, dan memuaskan bagi masyarakat.

Permasalahan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai pada dasarnya berangkat dari tuntutan masyarakat dan aparaturnya pemerintahan terhadap layanan informasi yang cepat, akurat, transparan, serta berlandaskan teknologi digital yang terus berkembang. Dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai memiliki posisi strategis sebagai pengelola informasi publik, pengembangan infrastruktur teknologi, pengamanan data, serta penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai diharapkan mampu memberikan gambaran adanya kesenjangan antara kebutuhan layanan publik yang ideal dengan kemampuan penyelenggaraan layanan yang ada. Hal ini bisa meliputi aspek infrastruktur TIK yang belum merata, kualitas SDM yang perlu ditingkatkan, tata kelola data dan informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, hingga rendahnya literasi digital masyarakat.

Adapun permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Binjai adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Binjai

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	
	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	a	Tidak diberdayakannya kembali kelompok informasi masyarakat
		b	Kurangnya badan publik dalam memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dalam melayanin pemohon Informasi
		c	Masih kurangnya mekanisme cepat tanggap (counter) untuk meluruskan informasi/berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial yang sulit terbendung
		d	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian jurnalistik atau literasi digital
		e	Masih ada kesenjangan antara informasi yang ingin disampaikan pemerintah dengan persepsi masyarakat
2	BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA	a	Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
		b	Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi
		c	Terbatasnya tenaga teknis bidang IT
		d	Data center yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam melayani penyimpanan data digital bagi OPD yang berada dalam jaringan intranet yang <i>merupakan common data base system</i> informasi bagi semua entitas
		e	Masih banyak unit kerja yang belum memanfaatkan secara maksimal ketersediaan website yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika

		f	<i>Bandwidht</i> internet terpusat yang dikelola oleh Diskominfo besarannya belum memadai
		g	Belum ada jalur backup jaringan internet di Kantor Pemerintah Kota Binjai
		h	Infrastruktur jaringan belum menerapkan mekanisme <i>firewall</i> dan <i>proxy server</i> untuk memberikan keamanan akses internet
		i	Keamanan infrastruktur baru ditetapkan secara terbatas
3	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	a	Masih belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
		b	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian statistik dan persandian
		c	Masih banyak unit kerja yang belum memiliki kepedulian terhadap pengumpulan data
		d	Masih belum maksimalnya pelaksanaan integrasi dalam satu data daerah
		e	Akses publik terhadap data terbuka (open data) masih rendah dikarenakan infrastruktur portal data belum optimal
		f	Kurangnya pemahaman ASN dan masyarakat tentang arti pentingnya data
		g	Perangkat Daerah belum seluruhnya menggunakan sistem keamanan informasi

2.6. ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah permasalahan mendasar atau pokok penting yang dihadapi oleh organisasi/perangkat daerah yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan di masa mendatang.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat, keberadaannya mulai menjadi bagian dari keseharian masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun di sisi lain kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat sehingga, masih memunculkan kesenjangan

yang semakin bertambah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terkait dengan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, hal ini merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.

Implementasi pemanfaatan teknologi mulai berkembang di Kota Binjai. Namun secara substansif masih banyak berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a) Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
- b) Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan Kota Binjai yang maju, berbudaya dan religius.
- c) Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. hal ini menunjukkan bahwa Kota Binjai memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- d) Leadership Kepala Daerah yang kapabel, kreatif dan aspiratif mendorong pengembangan Kota Binjai sebagai kota jasa yang profesional.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a) Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
- b) Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)

- a) Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b) Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W - T)

- a) Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
- b) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.

Dalam rangka perwujudan kota yang maju, berbudaya dan religi melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

- 1. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
- 2. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan

kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Binjai 2025 – 2029 yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025 – 2029 yang merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur

yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Maksud dari visi tersebut adalah: Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025 – 2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah

lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai yang lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN 2025 – 2029 dan Misi 1 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1 pada RPJPD Binjai.

Misi 2: Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi, sejalan dengan Asta Cita 2, 4, 5 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 dan 5 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1, 2 dan 5 pada RPJPD Binjai.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 4 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 6 dan 7 pada RPJPD Binjai.

Misi 4: Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025 – 2029 dan Misi 3 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai.

Tujuan pembangunan Kota Binjai tahun 2025 – 2029 dirancang untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap tujuan yang dirumuskan bertujuan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kota Binjai. Melalui program-program yang berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, diharapkan Kota Binjai dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Setiap tujuan pembangunan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan tercapainya hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi seluruh warga kota.

Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2025 - 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan..
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 146 RPJMD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2029 Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Untuk mewujudkan Visi ***“MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”*** dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN 2025 – 2029 dan Misi 1 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1 pada RPJPD Binjai.

Misi 2: Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi, sejalan dengan Asta

Cita 2, 4, 5 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 dan 5 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1, 2 dan 5 pada RPJPD Binjai.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 4 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 6 dan 7 pada RPJPD Binjai.

Misi 4: Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025 – 2029 dan Misi 3 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai.

Tujuan pembangunan Kota Binjai tahun 2025 – 2029 dirancang untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap tujuan yang dirumuskan bertujuan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kota Binjai. Melalui program-program yang berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, diharapkan Kota Binjai dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Setiap tujuan pembangunan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan tercapainya hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi seluruh warga kota.

Untuk menunjang visi diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai berperan pada misi ke 4 (empat) yaitu :

“Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif”.

Yang bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, dan hal tersebut sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025 – 2029 dan Misi 3 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai.

Sasaran pembangunan Kota Binjai 2025 – 2029 merupakan langkah konkret yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran-sasaran ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Setiap sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi progres pembangunan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan Kota Binjai. Melalui sasaran yang terukur dan terarah, diharapkan Kota Binjai dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Adapun sasaran pembangunan Kota Binjai tahun 2025 – 2029 yang mendukung tugas dan fungsi pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai “Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Pemerintahan” .

Sasaran ini menekankan pentingnya transformasi digital dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan keterjangkauan, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui indikator seperti Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Masyarakat Digital Indonesia, serta Indeks Demokrasi Indonesia dan jumlah kerja sama Kota Binjai, sasaran ini menggambarkan komitmen untuk memperluas kanal interaksi antara pemerintah dan warga melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Masyarakat akan semakin dimudahkan dalam mengakses layanan administratif, memberikan aspirasi, hingga terlibat dalam pengambilan keputusan publik melalui platform daring maupun layanan langsung yang adaptif dan partisipatif. Dengan peningkatan aksesibilitas ini,

pemerintah daerah tidak hanya memperpendek jarak antara layanan dan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal serta memperluas jejaring kerja sama dengan pihak lain, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung inovasi dan efisiensi pelayanan publik.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2025 – 2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 di atas, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, bagaimana Tujuan dan Sasaran RPJMD tercapai maka ditetapkan Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2025 – 2029 yaitu “Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital”.

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai. untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai yaitu “Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital”.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai melakukan :

1. Melakukan penguatan Infrastruktur Digital dengan menjamin kualitas konektivitas dan memaksimalkan pemanfaatan pusat data dan terintegrasi dengan pusat data nasional

2. Melakukan Pengembangan Sistem dan Aplikasi dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta digitalisasi Administrasi
3. Meningkatkan Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi dengan menyusun Kebijakan Satu Data Daerah, meningkatkan keamanan siber, dan membentuk tim tanggap insiden keamanan (CSIRT)
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Literasi Digital untuk membentuk Sumber Daya Manusia baik bagi ASN maupun masyarakat.
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi menyusun Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan memperbaiki sistem secara berkelanjutan berdasarkan masukan publik.
6. Melakukan Kolaborasi dan Inovasi untuk menjalankan program Smart City.
7. Memaksimalkan Diseminasi Informasi Layanan Publik Digital untuk menyampaikan informasi terkait layanan publik melalui berbagai kanal; website, media sosial, media massa dan publikasi cetak.
8. Mengoptimalkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pusat data dan informasi).
9. Memaksimalkan penerapan sistem data dengan menerapkan Satu Data Daerah agar data abtar OPD bisa terhubung.

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika , telah disusun pula sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai											
Meningkatnya ketahanan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Meningkatnya Transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	0	0	43	50	55	60	65	
			Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	0	0	70	74	77	80	81	
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	0	70	74	77	80	81	
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	0	1,6	1,8	2	2,3	2,6	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	1,85	2	2,25	2,4	2,5	2,6	
			Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	0	0	43	50	55	60	65	

		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	0	0	70	74	77	80	81	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	0	65	70	75	78	80	
		Indeks SPBE (Indeks)	3,12	3,24	3,35	3,46	3,57	3,68	3,79	
	Meningkatkan layanan statistik yang akurat dan diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	1,85	2	2,25	2,4	2,5	2,6	
	Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	0	200	250	275	300	325	
		Indeks SPBE (Indeks)	3,12	3,14	1,8	1,8	1,9	1,9	2	

3.2. Startegi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Strategi merupakan rencana tindakan atau serangkaian tindakan bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai mencapai tujuan akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Rumusan strategi berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-

langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Strategi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai bagi setiap program prioritas dimana hal tersebut selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD Strategi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras.

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih focus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Kota Binjai, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Renstra Diskominfo Kota Binjai Tahun 2025 – 2029. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Binjai adalah :

TABEL 3.4 :

Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat Satu Data dan statistik sektoral: dengan menetapkan peran Walidata/Produsen Data, standarisasi metadata, dan menyediakan portal data daerah untuk transparansi dan pengambilan keputusan.	Membangun fondasi SPBE dan arsitektur TIK: selaraskan Master Plan TIK Binjai dengan Arsitektur & Peta Rencana SPBE Nasional agar layanan terintegrasi, efisien, dan mudah diakses.	Memaksimalkan Keamanan siber dan privasi: kebijakan keamanan berbasis risiko, audit berkala dengan Indeks KAMI, hardening infrastruktur, dan perluasan TTE untuk efisiensi birokrasi.	Memaksimalkan Keterbukaan informasi proaktif: optimalkan PPID, konten rutin, SLA permohonan informasi, dan otomasi pencatatan permohonan.	Memaksimalkan premanaafaatan Komunikasi publik dengan mengaktifkan KIM sebagai duta literasi digital/mitra diseminasi.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman

yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan pembangunan disusun sebagai langkah strategis untuk mewujudkan strategi yang telah dirancang serta menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Implementasi arah kebijakan setiap tahunnya akan membentuk fokus atau tema pembangunan yang lebih terarah. Dengan demikian, strategi dan kebijakan yang dipilih dirumuskan secara sistematis guna mencapai tujuan serta sasaran pembangunan jangka menengah Kota Binjai secara optimal.

Arah kebijakan Renstra Diskominfo Binjai 2025–2029:

TABEL 3.5
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BINJAI

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendaftaran & inventarisasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik	Mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform digital yang terpadu dan efisien.	Modernisasi layanan publik digital memastikan sistem terlindungi & terdaftar, kesiapan integrasi	Permen Komdigi No.5/2025 tentang PSE Lingkup Publik
2	Pembentukan & penyesuaian struktur organisasi serta klasifikasi jabatan	Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensi di bidang pelayanan publik berbasis digital.	Bangun fondasi SPBE & SDM sesuaikan struktur Diskominfo untuk fungsi arsitektur SPBE, Satu Data, keamanan	Permen Komdigi No.1/2025 (OTK Kementerian) & No.9/2025 (klasifikasi jabatan)
3	Standar pengamanan endpoint & manajemen perangkat	Memperkuat keamanan data dan jaringan guna memastikan perlindungan informasi pemerintahan dan publik	Keamanan siber dan privasi kebijakan berbasis risiko, audit berkala Indeks KAMI, rencana backup/DRC, dan penerapan TTE	SE Sekjen Komdigi No.4/2025 (standar pengamanan endpoint), pedoman Indeks KAMI
4	Manajemen spektrum & perluasan konektivitas publik	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK serta pusat data daerah untuk mendukung sistem pemerintahan digital	Integrasi infrastruktur & akses publik media center, Wi-Fi publik, standar uptime, integrasi aplikasi	Permen Komdigi No.2/2025 (aturan spektrum & standar teknis)
5	Tata kelola data & Satu Data daerah	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK serta pusat data daerah untuk mendukung sistem pemerintahan digital	Perkuat Satu Data & statistik sektoral standar metadata, portal satu data, integrasi data antar OPD	Perpres No.39/2019 (Satu Data Indonesia) & kebijakan SPBE nasional

Tindakan yang dilakukan untuk mendukung arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai antara lain dengan :

1. Pemanfaatan TIK untuk layanan dan informasi publik, termasuk pembukaan kanal partisipasi/aspirasi/pengaduan.
2. Penguatan keterbukaan informasi melalui PPID/PPID Pembantu dan layanan publik yang interaktif.
3. Pemberdayaan komunikasi publik & KIM (membina/menambah KIM, memaksimalkan media informasi secara kreatif & inovatif).
4. Penguatan fungsi statistik sektoral (penyediaan data statistik sektoral untuk publik).
5. Penyusunan Master Plan TIK sebagai pedoman pengembangan TIK.
6. Integrasi aplikasi & penguatan infrastruktur (media center, website resmi OPD, aplikasi terintegrasi, perluasan jaringan TIK/wi-fi publik).
7. Keamanan informasi & TTE (standardisasi mengacu ISO/IEC 27001, perluasan tanda tangan elektronik).

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana semua program di tiap SKPD sudah di tetapkan dalam suatu system yang disebut SIPD yang mana isinya sesuai dengan RPJMD.

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, maka perlu disusun program dan kegiatan untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan.

Rencana program kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan.	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah Unit Paket kendaraan yang disediakan	2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung yang di Rehabilitasi/Pelihara	2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital			Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks SPBE	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

				Terwujudnya Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika		2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terwujudnya Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika		2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>	2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					<i>Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional</i>	2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					<i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra</i>	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					<i>Pemerintah Daerah Kab/ Kota</i>		
					<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/ atau Portal Data Nasional</i>	2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE</i>	2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					<i>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali</i>	2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					<i>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					<i>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</i>	2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	
					<i>Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>	2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					<i>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>	2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					<i>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan</i>	2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					Kabupaten/Kota Cerdas		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terwujudnya Peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					<i>Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>	2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	
					<i>Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik</i>	2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>	2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					<i>Persentase khalayak yang terpapar informasi publik</i>	2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	
					<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis</i>	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					<i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik</i>	2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

				<i>yang disusun</i>	Komunikasi Publik	
				<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	
				<i>Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan</i>	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
	Meningkatkan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			
	Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik Daerah			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Terwujudnya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik Daerah		2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik</i>	2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

					<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk</i>	2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.</i>	2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>	2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					<i>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral</i>	2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					<i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i>	2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi		Indeks SPBE (terkait Keamanan)			
		Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

				Terwujudnya peningkatan Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</i>	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam</i>	2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

					<i>menjalankan penyelenggaraan persandian</i>		
				Terwujudnya peningkatan Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.</i>	2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai. Rencana Program Prioritas beserta indikator kinerja program dan Pagu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya

dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai ke dalam Rencana Kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan Kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai. Indikator Kinerja Program Prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program. *Outcome* merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

TABEL 4.2
PROGRAM PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KOTA BINJAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.982.882.680		11.089.759.216		12.698.521.059		15.000.824.117		17.313.315.775	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.040.964.000		5.199.156.800		5.739.788.160		6.581.573.638		7.249.420.701	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.040.964.000		5.199.156.800		5.739.788.160		6.581.573.638		7.249.420.701	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN			2.237.507.680		2.672.209.216		3.211.851.059		3.852.821.271		4.619.983.925	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	70,45	2.237.507.680	72,25	2.672.209.216	75	3.211.851.059	80	3.852.821.271	83,24	4.619.983.925	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.704.411.000		3.218.393.200		3.746.881.840		4.566.429.208		5.443.911.149	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	43	2.704.411.000	50	3.218.393.200	55	3.746.881.840	60	4.566.429.208	65	5.443.911.149	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			229.048.500		275.550.200		330.460.540		397.451.237		473.062.745	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			229.048.500		275.550.200		330.460.540		397.451.237		473.062.745	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2	229.048.500	2,25	275.550.200	2,4	330.460.540	2,5	397.451.237	2,6	473.062.745	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			145.790.000		174.948.000		209.937.600		251.925.120		302.310.144	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN			145.790.000		174.948.000		209.937.600		251.925.120		302.310.144	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

INFORMASI												
meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	1,6	145.790.000	1,8	174.948.000	2	209.937.600	2,3	251.925.120	2,6	302.310.144	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN			9.357.721.180.00		11.540.257.416.00		13.238.919.199.00		15.650.200.474.00		18.088.688.664.00	

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas, dilakukan pentahapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel 4.3 berikut :

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.982.882.680		11.089.759.216		12.698.521.059		15.000.824.117		17.313.315.775		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.040.964.000		5.199.156.800		5.739.788.160		6.581.573.638		7.249.420.701		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.040.964.000		5.199.156.800		5.739.788.160		6.581.573.638		7.249.420.701	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.400.000		26.880.000		6.336.000		6.912.000		8.294.400		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	4.400.000	1	26.880.000	1	6.336.000	1	6.912.000	1	8.294.400		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.400.000		2.880.000		3.456.000		3.456.000		4.147.200		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.880.000	1	3.456.000	1	3.456.000	1	4.147.200		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		24.000.000		2.880.000		3.456.000		4.147.200		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	24.000.000	1	2.880.000	1	3.456.000	1	4.147.200		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.660.047.735		3.169.204.282		3.913.524.539		4.055.581.091		4.672.004.445		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	26	2.660.047.735	28	3.169.204.282	32	3.913.524.539	36	4.055.581.091	40	4.672.004.445		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.558.047.735		3.046.804.282		3.766.244.539		3.879.325.091		4.460.497.245		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	26	2.558.047.735	28	3.046.804.282	32	3.766.244.539	36	3.879.325.091	40	4.460.497.245		
2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100.000.000		120.000.000		144.400.000		172.800.000		207.360.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	144.400.000	1	172.800.000	1	207.360.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000		2.400.000		2.880.000		3.456.000		4.147.200		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.400.000	1	2.880.000	1	3.456.000	1	4.147.200		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		207.360.000		
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	100.000.000	5	120.000.000	5	144.000.000	5	172.800.000	5	207.360.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000		30.000.000		36.000.000		43.200.000		51.840.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	36.000.000	1	43.200.000	1	51.840.000		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	75.000.000	5	90.000.000	5	108.000.000	5	129.600.000	5	155.520.000		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				679.964.000		815.956.800		979.158.160		1.174.977.79 ₂		1.409.972.55 ₁		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	679.964.000	2	815.956.800	2	979.158.160	2	1.174.977.79 ₂	2	1.409.972.55 ₁		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		6.600.000		7.920.000		9.504.000		11.404.800		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.500.000	1	6.600.000	1	7.920.000	1	9.504.000	1	11.404.800		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		42.000.000		50.400.000		60.480.000		72.576.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	42.000.000	1	50.400.000	1	60.480.000	1	72.576.000		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				156.000.000		187.200.000		224.650.000		269.568.000		323.481.600		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	156.000.000	2	187.200.000	2	224.650.000	2	269.568.000	2	323.481.600		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				52.000.000		62.400.000		74.880.000		89.856.000		107.827.200		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	52.000.000	2	62.400.000	2	74.880.000	2	89.856.000	2	107.827.200		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				53.000.000		63.600.000		76.320.000		91.584.000		109.900.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	53.000.000	1	63.600.000	1	76.320.000	1	91.584.000	1	109.900.000		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				79.464.000		95.356.800		114.428.160		137.313.792		164.776.551		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	79.464.000	1	95.356.800	1	114.428.160	1	137.313.792	1	164.776.551		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				299.000.000		358.800.000		430.560.000		516.672.000		620.006.400		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	299.000.000	6	358.800.000	6	430.560.000	6	516.672.000	6	620.006.400		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.000.000		416.000.000		0		275.000.000		0		
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	5	55.000.000	6	416.000.000	-	0	7	275.000.000	-	0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		1		-		4		-			
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		350.000.000		0		200.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	1	350.000.000	-	0	4	200.000.000	-	0		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				55.000.000		66.000.000		0		75.000.000		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	5	55.000.000	6	66.000.000	-	0	7	75.000.000	-	0		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				273.462.265		337.767.718		328.092.861		463.357.035		443.096.041		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	273.462.265	1	337.767.718	1	328.092.861	1	463.357.035	1	443.096.041		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1		1		-		1		-			
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		14.400.000		17.280.000		20.736.000		24.883.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	20.736.000	1	24.883.000		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.000.000		138.000.000		165.600.000		198.720.000		209.106.520		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	115.000.000	1	138.000.000	1	165.600.000	1	198.720.000	1	209.106.520		
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.620.000		64.357.000		0		69.645.600		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1	45.620.000	1	64.357.000	-	0	1	69.645.600	-	0		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.842.265		121.010.718		145.212.861		174.255.435		209.106.521		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	100.842.265	1	121.010.718	1	145.212.861	1	174.255.435	1	209.106.521		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				268.090.000		313.348.000		368.676.600		432.945.720		508.693.264		
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	268.090.000	25	313.348.000	25	368.676.600	25	432.945.720	25	508.693.264		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9		9		10		10		12			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.490.000		138.588.000		166.306.600		199.566.720		239.480.064		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	115.490.000	9	138.588.000	10	166.306.600	10	199.566.720	12	239.480.064		
2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.600.000		27.560.000		31.450.000		34.567.000		37.560.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	10	25.600.000	10	27.560.000	10	31.450.000	10	34.567.000	10	37.560.000		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	75.000.000	25	90.000.000	25	108.000.000	25	129.600.000	25	155.520.000		
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				52.000.000		57.200.000		62.920.000		69.212.000		76.133.200		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	52.000.000	1	57.200.000	1	62.920.000	1	69.212.000	1	76.133.200		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.237.507.680		2.672.209.216		3.211.851.059		3.852.821.271		4.619.983.925		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	70,45	2.237.507.680	72,25	2.672.209.216	75	3.211.851.059	80	3.852.821.271	83,24	4.619.983.925	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.237.507.680		2.672.209.216		3.211.851.059		3.852.821.271		4.619.983.925		
Terwujudnya Peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	-	1	2.237.507.680	1	2.672.209.216	1	3.211.851.059	1	3.852.821.271	1	4.619.983.925		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	-	2		2		2		2		2			
Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	-	1		1		1		1		1			
Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	-	55		55		55		55		55			
Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	1		2		2		2		2			

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	-	55		55		55		55		55			
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan (Orang)	-	35		35		35		35		35			
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	-	2		2		2		2		2			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				832.500.000		999.000.000		1.198.800.000		1.438.560.000		1.726.272.000		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	1	832.500.000	2	999.000.000	2	1.198.800.000	2	1.438.560.000	2	1.726.272.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				34.000.000		40.800.000		48.960.000		58.752.000		70.502.400		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	-	2	34.000.000	2	40.800.000	2	48.960.000	2	58.752.000	2	70.502.400		
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				25.000.000		27.000.000		31.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	31.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				565.000.000		670.000.000		812.000.000		974.800.000		1.181.160.000		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	-	2	565.000.000	2	670.000.000	2	812.000.000	2	974.800.000	2	1.181.160.000		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				23.000.000		27.600.000		33.120.000		39.744.000		47.692.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	-	55	23.000.000	55	27.600.000	55	33.120.000	55	39.744.000	55	47.692.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				15.500.000		18.600.000		22.320.000		26.784.000		32.140.000		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	-	1	15.500.000	1	18.600.000	1	22.320.000	1	26.784.000	1	32.140.000		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				17.500.000		21.000.000		25.200.000		30.240.000		36.288.000		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	-	55	17.500.000	55	21.000.000	55	25.200.000	55	30.240.000	55	36.288.000		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				651.007.680		781.209.216		937.451.059		1.124.941.27 ₁		1.349.929.52 ₅		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	-	2	651.007.680	2	781.209.216	2	937.451.059	2	1.124.941.27 ₁	2	1.349.929.52 ₅		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	-	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				25.000.000		27.000.000		35.000.000		45.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	-	1	25.000.000	1	27.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				35.000.000		45.000.000		52.000.000		62.000.000		63.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	-	35	35.000.000	35	45.000.000	35	52.000.000	35	62.000.000	35	63.000.000		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.704.411.000		3.218.393.200		3.746.881.840		4.566.429.208		5.443.911.149		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	-	43	2.704.411.000	50	3.218.393.200	55	3.746.881.840	60	4.566.429.208	65	5.443.911.149	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				475.474.000		570.568.800		684.682.560		821.619.072		985.942.887		
Terwujudnya Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	475.474.000	1	570.568.800	1	684.682.560	1	821.619.072	1	985.942.887		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				475.474.000		570.568.800		684.682.560		821.619.072		985.942.887		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	475.474.000	1	570.568.800	1	684.682.560	1	821.619.072	1	985.942.887		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.228.937.000		2.647.824.400		3.062.199.280		3.744.810.136		4.457.968.262		
Terwujudnya Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	-	1	2.228.937.000	1	2.647.824.400	1	3.062.199.280	1	3.744.810.136	1	4.457.968.262		
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	5	5		5		5		5		5			

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1	1		2		3		4		5			
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	9	10		11		12		13		14			
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				675.000.000		810.000.000		972.000.000		1.166.400.000		1.399.680.000		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	9	10	675.000.000	11	810.000.000	12	972.000.000	13	1.166.400.000	14	1.399.680.000		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				12.500.000		15.000.000		18.000.000		21.600.000		25.920.000		
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1	12.500.000	1	15.000.000	1	18.000.000	1	21.600.000	1	25.920.000		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31.000.000		37.200.000		44.640.000		53.568.000		64.281.600		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan	-	1	31.000.000	1	37.200.000	1	44.640.000	1	53.568.000	1	64.281.600		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)													
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				23.000.000		27.600.000		33.120.000		39.744.000		47.692.800		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	-	1	23.000.000	1	27.600.000	1	33.120.000	1	39.744.000	1	47.692.800		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				24.560.000		29.472.000		35.366.400		42.439.680		50.927.616		
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	1	24.560.000	1	29.472.000	1	35.366.400	1	42.439.680	1	50.927.616		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				765.000.000		918.000.000		1.016.000.000		1.321.920.000		1.586.304.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	5	5	765.000.000	5	918.000.000	5	1.016.000.000	5	1.321.920.000	5	1.586.304.000		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				124.000.000		136.400.000		150.040.000		165.044.000		181.548.400		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	124.000.000	1	136.400.000	1	150.040.000	1	165.044.000	1	181.548.400		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				145.000.000		159.500.000		175.450.000		192.995.000		212.294.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1	1	145.000.000	2	159.500.000	3	175.450.000	4	192.995.000	5	212.294.500		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				27.840.000		33.408.000		40.089.600		48.107.520		57.729.024		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	1	27.840.000	1	33.408.000	1	40.089.600	1	48.107.520	1	57.729.024		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				276.000.000		331.200.000		397.440.000		476.928.000		572.313.600		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	-	2	276.000.000	2	331.200.000	2	397.440.000	2	476.928.000	2	572.313.600		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				45.678.000		54.813.600		65.776.320		78.931.584		94.717.900		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	45.678.000	1	54.813.600	1	65.776.320	1	78.931.584	1	94.717.900		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				56.789.000		68.146.800		81.776.160		98.131.392		117.757.670		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	56.789.000	1	68.146.800	1	81.776.160	1	98.131.392	1	117.757.670		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				22.570.000		27.084.000		32.500.800		39.000.960		46.801.152		
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1	1	22.570.000	1	27.084.000	1	32.500.800	1	39.000.960	1	46.801.152		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				229.048.500		275.550.200		330.460.540		397.451.237		473.062.745		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				229.048.500		275.550.200		330.460.540		397.451.237		473.062.745		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	2	229.048.500	2,25	275.550.200	2,4	330.460.540	2,5	397.451.237	2,6	473.062.745	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				229.048.500		275.550.200		330.460.540		397.451.237		473.062.745		
Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik Daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	-	50	229.048.500	52	275.550.200	55	330.460.540	58	397.451.237	60	473.062.745		
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	-	1		1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	-	50		52		55		58		60			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	-	35		37		40		42		45			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	-	35		37		40		42		45			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	-	5		5		5		5		5			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				44.900.000		53.880.000		64.656.000		77.567.200		93.104.640		
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	-	35	44.900.000	37	53.880.000	40	64.656.000	42	77.567.200	45	93.104.640		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				56.000.000		67.200.000		80.640.000		96.768.000		116.121.600		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	-	35	56.000.000	37	67.200.000	40	80.640.000	42	96.768.000	45	116.121.600		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				36.780.000		44.136.000		52.963.200		63.555.840		76.267.008		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	-	50	36.780.000	52	44.136.000	55	52.963.200	58	63.555.840	60	76.267.008		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				45.465.000		54.558.000		65.469.900		78.563.520		94.276.224		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	-	5	45.465.000	5	54.558.000	5	65.469.900	5	78.563.520	5	94.276.224		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				25.467.500		30.561.000		36.673.200		44.007.840		52.809.408		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	-	50	25.467.500	52	30.561.000	55	36.673.200	58	44.007.840	60	52.809.408		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				20.436.000		25.215.200		30.058.240		36.988.837		40.483.865		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	-	1	20.436.000	1	25.215.200	1	30.058.240	1	36.988.837	1	40.483.865		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				145.790.000		174.948.000		209.937.600		251.925.120		302.310.144		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				145.790.000		174.948.000		209.937.600		251.925.120		302.310.144		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

meningkatkan keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	1,6	145.790.000	1,8	174.948.000	2	209.937.600	2,3	251.925.120	2,6	302.310.144	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				113.740.000		136.488.000		163.785.600		196.542.720		235.851.264		
Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	-	1	113.740.000	1	136.488.000	1	163.785.600	1	196.542.720	1	235.851.264		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	-	4		5		6		7		8			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				43.570.000		52.284.000		62.740.800		75.288.960		90.346.752		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	-	1	43.570.000	1	52.284.000	1	62.740.800	1	75.288.960	1	90.346.752		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				24.000.000		28.800.000		34.560.000		41.472.000		49.766.400		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	-	1	24.000.000	1	28.800.000	1	34.560.000	1	41.472.000	1	49.766.400		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				21.670.000		26.004.000		31.204.800		37.445.760		44.934.912		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	-	4	21.670.000	5	26.004.000	6	31.204.800	7	37.445.760	8	44.934.912		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				24.500.000		29.400.000		35.280.000		42.336.000		50.803.200		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	-	1	24.500.000	1	29.400.000	1	35.280.000	1	42.336.000	1	50.803.200		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				32.050.000		38.460.000		46.152.000		55.382.400		66.458.880		
Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	-	1	32.050.000	1	38.460.000	1	46.152.000	1	55.382.400	1	66.458.880		

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				32.050.000		38.460.000		46.152.000		55.382.400		66.458.880		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	-	1	32.050.000	1	38.460.000	1	46.152.000	1	55.382.400	1	66.458.880		

TABEL 4.4

**DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	

			2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
--	--	--	---	--

Perencanaan strategis Dinas Kota Binjai tahun 2025 - 2029 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPJMD Kota Binjai Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Diskominfo. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Diskominfo Kota Binjai dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Binjai Tahun 2025 - 2029.

udnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta berbasis teknologi informasi. IKD ini juga memastikan bahwa setiap program Diskominfo tidak hanya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi juga berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing kota di era digital.

Secara lebih spesifik, IKD Diskominfo Kota Binjai mencakup indikator-indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan transformasi digital di daerah, seperti indeks keterbukaan informasi publik, indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), tingkat literasi digital masyarakat, hingga persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pelayanan publik. Melalui pencapaian IKD yang terukur, diharapkan Diskominfo

mampu memperkuat tata kelola informasi dan komunikasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Binjai tahun 2025 - 2029, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Diskominfo Kota Binjai Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.5

INDIKATOR KINERJA DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai										
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
1	Indeks SPBE	Indeks	3,12	3,14	1,8	1,8	1,9	1,9	2	

Berdasarkan surat Kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 terkait Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE pada point 6 (enam) disampaikan target Indeks SPBE menggunakan indikator baru pada Tahun 2026 dengan periode evaluasi nasional dilakukan per 2 (dua) Tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai disusun untuk mengukur capaian kinerja organisasi secara terukur, transparan, dan akuntabel dalam mendukung visi serta misi Pemerintah Kota Binjai. IKU menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan mampu meningkatkan kualitas layanan komunikasi publik, pengelolaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan adanya IKU, arah pembangunan sektor komunikasi dan informatika dapat dikendalikan secara lebih efektif, sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi dan transformasi digital di daerah.

Lebih jauh, IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai difokuskan pada penguatan akses masyarakat terhadap layanan informasi publik, peningkatan keamanan dan keterhubungan data pemerintah daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi. Melalui pengukuran indikator yang jelas, seperti persentase keterbukaan informasi, tingkat pemanfaatan layanan digital, hingga indeks keamanan informasi, diharapkan Dinas Kominfo mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. IKU ini sekaligus menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar pemerintah	point	38	43	50	55	60	65	
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	point	1,85	2	2,25	2,4	2,5	2,6	
3	Indeks SPBE	point	3,14	1,8	1,8	1,9	1,9	2	Berdasarkan surat Kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 terkait Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE pada point 6 (enam) disampaikan target Indeks SPBE menggunakan indikator baru pada Tahun 2026 dengan periode evaluasi nasional dilakukan per 2 (dua) Tahun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai. IKK berfungsi sebagai tolok ukur spesifik terhadap output dan outcome dari program serta kegiatan yang dilaksanakan, sehingga setiap capaian kinerja dapat dinilai secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan IKK juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai untuk memfokuskan sumber daya pada target-target yang paling berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

Lebih lanjut, IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dirancang untuk mendukung transformasi digital daerah, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika. Indikator ini mencakup antara lain tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik, persentase keberhasilan penerapan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, hingga efektivitas pengelolaan data dan infrastruktur TIK. Dengan pengukuran kinerja yang jelas melalui IKK, diharapkan Diskominfo mampu menghadirkan layanan yang lebih transparan, inovatif, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern di Kota Binjai.

TABEL 4.7

**INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
TAHUN 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2025 - 2029

1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar pemerintah	Point	38	43	50	55	60	65	
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	0	65%	70%	75%	78%	80%	
3	Indeks SPBE	Point	3,14	1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	Berdasarkan surat Kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 terkait Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE pada point 6 (enam) disampaikan target Indeks SPBE menggunakan indikator baru pada Tahun 2026 dengan periode evaluasi nasional dilakukan per 2 (dua) Tahun
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Point	1,85	2	2,25	2,4	2,5	2,6	
5	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Point	0	1,6	1,8	2	2,3	2,6	

6	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Point	0	70	74	77	80	81	
---	--	-------	---	----	----	----	----	----	--

BAB V

P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai tahun 2025 - 2029 merupakan rencana /tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebgus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat informasi Kota Binjai yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.

